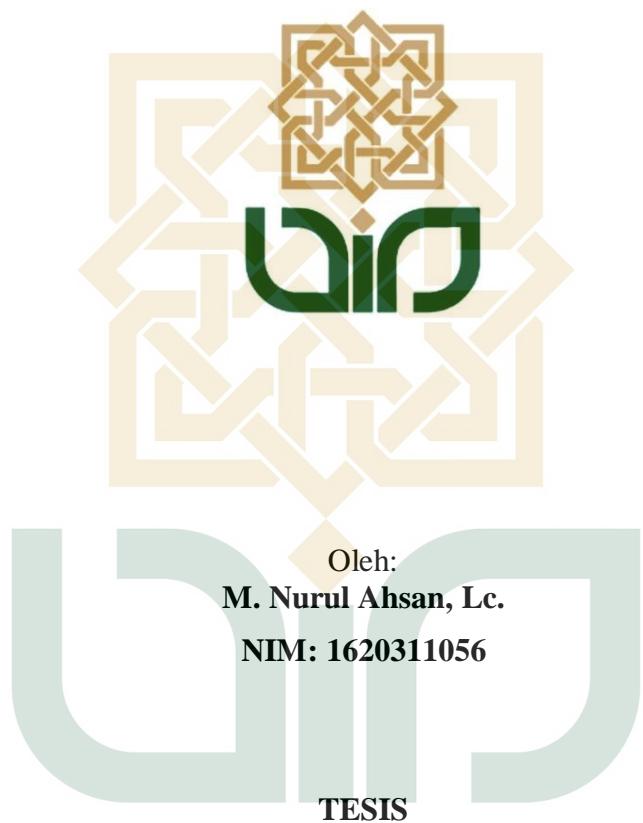


**KONSEP AKAD AL-QARD  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARIĀH***

(Studi Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang *al-Qard*)



Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

**M. Nurul Ahsan, 1620311056, KONSEP AKAD AL-QARD DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Studi Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang *al-Qard*)**, Tesis. Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Hukum *al-Qard*, Fatwa DSN-MUI, Fatwa AAOIFI, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riba.

Penelitian ini mengkaji konsep akad *al-qard* menurut fatwa skala nasional Dewan Syariah Nasional Majilis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan fatwa skala internasional *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Data-data yang disertakan meliputi fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang *al-Qard* serta pendapat fikih lintas mazhab. Setidaknya penelitian ini mengurai dua rumusan masalah: 1) apa perbedaan konsep akad *al-qard* menurut fatwa DSN-MUI dan AAOIFI?, dan; 2) bagaimana pandangan *Maqāṣid* mengenai fatwa tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-yuridis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai teori utama (*grand theory*) mengenai perbaikan jangkauan (*mu'ālajah al-mustawayāt*), pengembangan ekonomi kognitif (*al-iqtisād al-ma'rīfī*) dan cara berfikir skala prioritas (*al-aulawiyāt*). Teori ini dalam analisisnya juga menggunakan teori *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai teori bantu (*secondary theory*) mengenai maksud dan tujuan akad (*an-niyyah*) para pihak yang sedang berakad serta mengenai landasan hukum menggunakan adat kebiasaan (*al-'ādah/al-'urf*).

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI memiliki sejumlah perbedaan dan kesamaan: a. wilayah jangkauan serta pengaruh fatwa DSN-MUI lebih kecil daripada AAOIFI; b. fatwa AAOIFI jauh lebih komprehensif daripada fatwa DSN-MUI; c. perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada butir adat kebiasaan (*al-'ādah*) yang dituangkan dalam fatwa AAOIFI, namun tidak diakomodir dalam fatwa DSN-MUI; d. ketiadaan butir adat kebiasaan (*al-'ādah*) dalam fatwa DSN-MUI menjadi celah bagi lembaga keuangan syariah menerbitkan akad *al-qard* untuk meraih keuntungan hingga rentan digunakan legitimasi ajang praktik riba. 2) Pandangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI terdapat beberapa catatan: a. ada indikasi ketidakselarasan antara jangkauan *al-maqāṣid al-juz'iyyah al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah*; b. akad *al-qard* berpotensi dijadikan sebagai pengembangan ekonomi kognitif (*al-iqtisād al-ma'rīfī*), yaitu ekonomi berbasis ilmu pengetahuan; c. skala prioritas (*al-aulawiyāt*) dalam akad *al-qard* harus dirumuskan ulang agar keluarnya produk ini dapat tepat mengenai sasaran pada orang yang kurang mampu daripada diperuntukkan perusahaan-perusahaan raksasa yang seringnya hanya menghasilkan kebutuhan konsumtif.

## **PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nurul Ahsan, Lc.

NIM : 1620311056

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



**M. Nurul Ahsan, Lc.**

NIM: 1620311056

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP AKAD AL-QARD  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARI'AH*  
(Studi Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang *al-Qard*)**

yang ditulis oleh:

Nama : M. Nurul Ahsan, Lc.

NIM : 1620311056

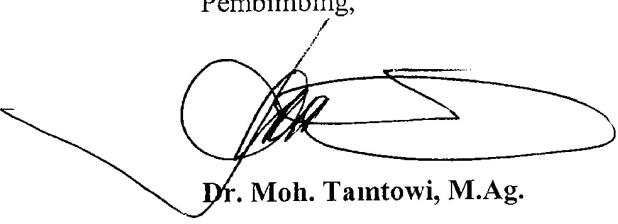
Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing,

  
**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**

NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/05/PP.00.9/2182/2018

Tugas Akhir dengan judul

: KONSEP AKAD AL-QARD DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYAR'AH (STUDI FATWA DSN-MUI DAN AAQIFI TENTANG AL-QARD )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H. M. NURUL AHSAN, Lc.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311056  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

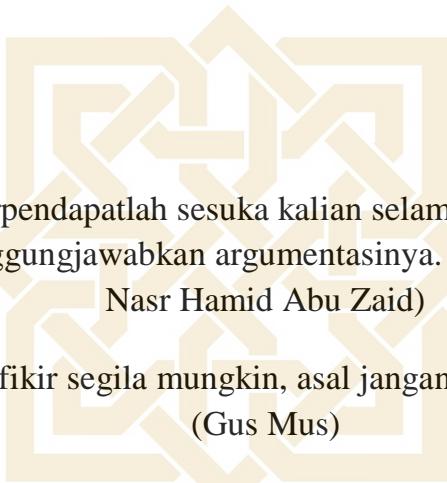
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005



## MOTTO



Berpendapatlah sesuka kalian selama mampu  
mempertanggungjawabkan argumentasinya. (*inspirade by:* Dr.  
Nasr Hamid Abu Zaid)

Silakan berfikir segila mungkin, asal jangan berhenti belajar!  
(Gus Mus)



## **PERSEMBAHAN**



Tulisan ini didedikasikan kepada:  
Ayahanda H. Djailani & Ibunda Hj. Khadijah,  
Istri tercinta, Izzatu Tazkiyah,  
Saudara-saudari kandung beserta suami/istri dan anak-anaknya,  
dan kepada semua orang yang mau berpikir dan bernurani.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين  
Ditulis muta‘aqqidīn

عدة  
Ditulis ‘iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة  
Ditulis Hibah

جزية  
Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء Ditulis karāmah al-auliyā`

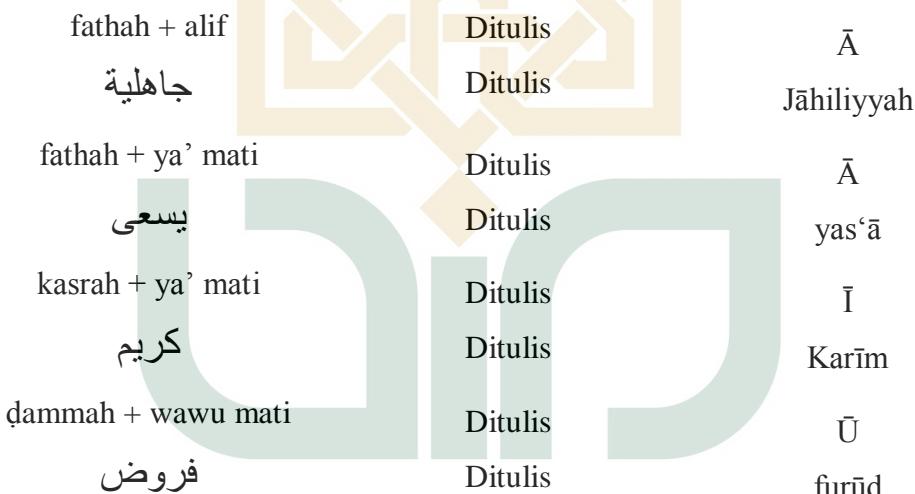
3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḥammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر Ditulis zakāt al-fitrī

#### D. Vokal Pendek



#### E. Vokal Panjang



#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بِنَكُم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قُول	Ditulis	Qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la`in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur`ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُرْوَضْ	Ditulis	żawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan anugerah yang tak terhingga kepada hamba-hamba-Nya, terutama kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan judul, “KONSEP AKAD *AL-QARD* DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH* (Studi Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang *al-Qard*)”. Shalawat serta salam tercurahkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, semoga kita selalu mendapat syafaatnya, terlebih kelak di hari kiamat. Amin.

Tesis ini peneliti sajikan dalam upaya memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum syariah ditinjau dari teori *maqāṣid asy-syarī’ah* dibantu dengan teori *al-qawā’id al-fiqhiyyah*. Dengan segala daya dan upaya, bimbingan serta arahan, dan hasil diskusi dengan sejumlah pihak, tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penulis menjalani masa studi di kampus ini sehingga penulis dapat memperoleh beragam ilmu yang bermanfaat;
4. Dr. Moh. Tamtowi., selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini hingga menjadi sebuah karya tulis yang (semoga) layak;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanpa dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Kedua orang tua penulis: Ayahanda H. Djailani (alm.) dan Ibunda Hj. Khadijah, yang telah memberi penghidupan dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya;
7. Istri tercinta Izzatu Tazkiyah dan saudara-saudari kandung penulis: Mbak Nafi'ah beserta suami, Kak Nur Kholis beserta istri, Kak Muntaha beserta istri, Mbak Qamariyatun beserta suami, Kak Khalid Ahmad beserta istri, Kak Abu Said beserta istri, Kak Misbah beserta istri, dan adik Imam Ahmad beserta istri. Atas dorongan mereka semua menjadikan penulis dapat melewati semua tantangan di setiap menempuh studi;
8. Keponakan-keponakan, terlebih Sofa Unnafis beserta suami dan Ahmad Hasan yang selalu memberikan semangat dan dengan sukarela menyediakan ruang selama proses penggerjaan tesis ini;

9. Sahabat-sahabat mahasiswa/i S2 konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan 2016 yang telah bersama-sama belajar dan saling berbagi pengetahuan selama kurang lebih dua tahun sehingga penulis mendapat begitu banyak cerita dan pengalaman yang layak dikenang;
10. Seluruh pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga saran dan kritik yang sifatnya konstruktif senantiasa penulis harapkan demi langkah ke arah lebih sempurna. Akhirnya, semoga tesis ini mendapat riâda Allah Swt dan dapat bermanfaat bagi pembaca, khusunya pengkaji Hukum Syariah. *Wa Allâhu al-muwâfiq ilâ aqwâm at-tarîq, wa ihdina as-şirâṭ al-mustaqqîm.*

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

**M. Nurul Ahsan, Lc.**

NIM: 1620311056

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	1
BAB I: PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoretis .....	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II: MENGENAL TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN TEORI <i>AL-QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH</i> .....	25
A. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Menurut Jasser Auda.....	25
1. Pengertian Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	25
2. Skala Prioritas ( <i>al-Aulawiyyāt</i> ).....	28
3. Ekonomi Kognitif ( <i>al-Iqtisād al-Ma'rifiy</i> ).....	30
4. Jangkauan <i>Maqāṣid</i> dan Fitur-Fiturnya .....	33
B. Teori <i>al-Qawā'id al-Fiqhiyyah</i> .....	38

1. Pengertian Teori <i>al-Qawā'id al-Fiqhiyyah</i> .....	40
2. Lima Kaidah Pokok ( <i>al-Qawā'id al-Kulliyah al-Kubrā</i> ).....	42
3. Apresiasi Hukum Terhadap Niat ( <i>al-Umūr bi Maqāṣidihā</i> ) .....	46
4. Adat Kebiasaan Sebagai Pijakan Hukum ( <i>al-'Ādah Muḥakkamah</i> ).....	48
<b>BAB III: KETENTUAN FATWA DSN-MUI DAN FATWA AAOIFI TENTANG AKAD <i>AL-QARD</i> .....</b>	<b>50</b>
A. Akad <i>al-Qard</i> Menurut DSN-MUI .....	50
B. Metode Fatwa DSN-MUI .....	53
C. Akad <i>al-Qard</i> Menurut AAOIFI.....	57
D. Kedudukan DSN-MUI dan AAOIFI .....	62
<b>BAB IV: ANALISIS <i>MAQĀṢID</i> TERHADAP FATWA DSN-MUI DAN FATWA AAOIFI .....</b>	<b>67</b>
A. Memetakan Jangkauan <i>Maqāṣid</i> dalam Akad <i>al-Qard</i> .....	67
B. Upaya Pengembangan Ekonomi Kognitif Melalui Akad <i>al-Qard</i> .....	73
C. Menata Ulang Skala Prioritas dalam Akad <i>al-Qard</i> .....	77
D. Cela-Cela dalam Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI .....	79
1. Fatwa AAOIFI Lebih Komprehensif Daripada Fatwa DSN-MUI: Sebuah Perbandingan.....	80
2. Aspek Niat Diabaikan Oleh Masing-Masing Fatwa DSN-MUI dan Fatwa AAOIFI.....	86
3. Adat Kebiasaan Menjadi Cela Terbitnya Akad <i>al-Qard</i> untuk Meraih Keuntungan .....	92
<b>BAB V: P E N U T U P .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hierarki teoretis dalam menganalisis akad *al-qard* dan tentu juga berlaku pada akad-akad yang lain, 21.

Gambar 2 : Hierarki *maqāṣid* menurut tingkatan keniscayaan, 29.

Gambar 3 : Hierarki *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut tingkatan, dilihat dari tingkatan paling dasar ke atas, 30.

Gambar 4 : Struktur perbaikan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah*, 35.

Gambar 5 : Menunjukkan *al-qawā'id al-kubrā* lahir dari al-Qur'an dan Hadis serta tidak bertentangan dengan ijmak ulama, 46.

Gambar 6 : Angka kemiskinan yang diambil dari Berita Resmi Badan Pusat Statistik, 75.

Gambar 7 : Menunjukkan dampak yang diakibatkan bila dalam fatwa tidak menuangkan niat dan adat kebiasaan, 98.

## BAB I: PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi dalam tatanan hukum Islam memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen umat untuk mendapatkan kebahagiaan (*al-falāḥ*). Alasan paling mendasar bahwa kebutuhan manusia dalam memperoleh hal-hal bersifat keakhiran (*ukhrawī*) tak bisa lepas dengan hal-hal bersifat keduniawian (*dunyawi*). Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi Islam pada prinsipnya merupakan tujuan syariah Islam itu sendiri (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang memuat nilai-nilai kebaikan dunia maupun akhirat. Dengan demikian sangat logis bila aktivitas ekonomi dalam Islam dikatakan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah sehingga perjalannya harus dituntun dan dikontrol agar dapat sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan (*kāffah*).<sup>1</sup>

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah yang bertujuan memberi solusi bagi problematika ekonomi masyarakat. Keuangan syariah secara esensial memiliki perbedaan dengan keuangan konvensional, baik dari aspek tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, tanggung jawab serta beberapa hal lainnya. Perbedaan paling mendasar diantara keduanya ialah setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah secara integral menjadi bagian dari sistem keuangan syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. vii.

<sup>2</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 27-29

Lembaga keuangan syariah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini memiliki beragam produk keuangan diantaranya akad *al-qard*. Produk ini merupakan pinjaman tanpa bunga (*non interest loan*) atau pinjaman kebajikan (*benevolent loan*) sebagai pembanding pinjaman berbunga di lembaga keuangan konvensional. Prinsip *al-qard* adalah pengalihan kepemilikan kepada seseorang dimana orang tersebut terikat untuk mengembalikannya dengan nilai serupa. Bila dalam pengembalian terdapat tambahan tanpa dipersyaratkan dalam akad, praktik semacam ini dalam terminologi Syāfiyyah biasa disebut *hasan* atau *al-qard al-hasran*. Bagi mayorita ulama akad ini dikatakan sebagai sebenarnya akad utang-piutang (*al-qard al-haqīqī*).<sup>3</sup>

Aktivitas muamalat di Indonesia secara umum merujuk pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia yang kemudian disebut DSN-MUI. Lembaga ini ditunjuk secara sah oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pemberi fatwa mengenai persoalan kegiatan mualamat di Indonesia.<sup>4</sup> Bukan hanya memberi fatwa, DSN-MUI juga memiliki tugas memberi pengawasan, membuat pedoman, mengeluarkan surat edaran, memberikan rekomendasi, menerbitkan surat pernyataan kesesuaian syariah dan lain-lain. DSN-MUI juga memiliki sejumlah wewenang diantaranya

---

<sup>3</sup> Ibnu ‘Ābidin ‘Alaih, *Ar-Radd al-Mukhtâr*, (Riyâd: Dâr Alâm al-Kutub, 2003 M./1423 H.), IV: 171; Abû al-Hasan al-Mâlikiy, *Kifâyah at-Tâlib ar-Rabbâniy*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1412 H.), II: 150; Abd al-Hamid asy-Syarwâniy, *Hâsiyyah asy-Syarwâniy ‘Alâ Tuḥfat al-Muhtâj* (Bairût: Dâr Ihyâ’ at-Turâs al-‘Arabiyy, 1983 M./1357 H.), V: 36.

<sup>4</sup> 1. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.

menerbitkan nota peringatan atas penyimpangan sebuah lembaga keuangan syariah hingga pembekuan, persetujuan atau penolakan atas suatu permohonan.<sup>5</sup>

Selain DSN-MUI, salah satu fatwa representatif skala internasional dipegang oleh *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution* yang kemudian disebut AAOIFI. Tujuan AAOIFI diantaranya mengembangkan pemikiran ekonomi sesuai prinsip syariah, mengeluarkan pemikiran tentang akuntasi dan mengaudit, meninjau, menyajikan serta menginterpretasikan standar akuntansi. Standar yang dikeluarkan AAOIFI saat ini telah diadopsi oleh bank sentral dan otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan syariah, baik secara penuh maupun sebagai pedoman dasar.<sup>67</sup> AAOIFI sesuai perannya juga mengeluarkan fatwa mengenai produk akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Kebetulan fatwa yang dikeluarkan AAOIFI mengenai akad *al-qard* relatif berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, khususnya dalam menyikapi persoalan adat kebiasaan (*al-'ādah*).<sup>8</sup>

Fenomena di atas pada akhirnya menjadi faktor determinan mengapa fatwa DSN-MUI dan AAOIFI cukup menarik dijadikan bahan penelitian guna mengetahui sejauh mana perbedaan keduanya serta bagaimana dampaknya bila

<sup>5</sup> <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada 27 April 2018.

<sup>6</sup> Muammar Arifat Yusmat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah; dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 166 – 167.

<sup>7</sup> Ikit, *Akuntasi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 35.

<sup>8</sup> Fatwa AAOIFI No. 19 Tahun 2004 tentang *al-Qard*.

fatwa tersebut dijadikan legalitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan roda perekonomiannya. Penilaian sejumlah pihak bahwa praktik riba dikatakan sedemikian mengakar di lembaga keuangan syariah juga penting dicermati agar diketahui di mana letak akar masalahnya. Bisa jadi penilaian itu merupakan asumsi semata tanpa dasar, tapi bisa jadi merupakan fakta yang timbul dari celah-celah fatwa, atau bisa jadi timbul karena pihak lembaga keuangan syariah tidak mengetahui secara persis prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Perbedaan paling menonjol antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional secara prinsip terletak pada aspek riba: sebuah isu paling mendasar yang telah diatur dalam hukum muamalat.<sup>9</sup> Hal yang hampir lazim terjadi di lembaga-lembaga keuangan konvensional ialah produk akad yang ditawarkan hampir selalu identik dengan praktik riba. Paradigma semacam ini sedikit banyak mempengaruhi perjalanan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun Internasional. Al-Qur`an dengan jelas dan tegas menyebut hukum keharaman riba dan pada saat yang sama dipertentangkan

---

<sup>9</sup> Kata *ribā* secara etimologi bahasa Arab ialah *az-ziyādah* yang berarti tambahan, atau ia *an-namā`* yang berarti tumbuh dan berkembang. Dalam terminologi hukum Islam kata riba memiliki beragam definisi berdasarkan pemahaman masing-masing ulama. Menurut Ḥanafiyah riba adalah lebihan atau tambahan yang dipersyaratkan salah satu orang yang sedang berakad (*muta`āqidain*) tanpa adanya kompensasi sesuai ketentuan syariah. Mālikiyah tidak mendefinisikan riba secara khusus kecuali dalam riba *fadl* yang didefinisikan sebagai penjualan, pembayaran, atau barter makanan (pokok) dengan sejenisnya secara tunai (*hālan*) serta terdapat lebihan di sana. Menurut Syāfiyyah riba adalah tukar-menukar tanpa diketahui kesamaannya yang dilakukan secara tunai maupun melalui tempo. Sedangkan menurut Ḥanabilah riba adalah sebuah kelebihan yang terjadi pada sesuatu yang khusus. Terdapat banyak lagi pandangan para ulama dalam menejelaskan riba, misalnya Abū Bakr ibn al-'Arabiy yang mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai barang pengganti. Ada juga yang mendefinisikan sebagai lebihan tanpa ada ganti yang dipersyaratkan salah satu dari para pihak. Menurut Antonia definisi riba ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bātil* atau salah. Lihat: Ramaḍan Hāfiẓ, Ramaḍan Hāfiẓ, *Mauqif asy-Syari`ah min al-Bunūk, al-Mu'āmalāt al-Masrafiyyah, at-Ta`mīn*, (Kairo: Dār as-Salām, 2009), hlm. 7 – 11; Sa`d a-dīn Muḥammad al-Kibbiy, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fi ḥaui al-Islām*, (Bairūt: al-Maktabah al-Islāmy, 2002), hlm. 154; Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

dengan hukum kehalalan niaga (dagang). Ketentuan ini direfleksikan dalam bentuk konsensus kaum muslimin sepanjang sejarah yang menegaskan bahwa riba jelas-jelas dilarang dalam agama.<sup>10</sup> Sayangnya praktik riba seakan menjadi sebuah pemandangan yang sedemikian mengakar meski slogan-slogan antri riba telah didengungkan sejak lama oleh para pemerhati ekonomi Islam.

Menurut Chapra, tidak mungkin menegakkan suatu bangunan kuat tanpa adanya suatu fondasi yang kokoh, begitu pula tidak mungkin menegakkan suatu ekonomi bebas riba tanpa adanya suatu lingkungan yang mendukung.<sup>11</sup> Dua unsur ini harus dijadikan skala prioritas bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Cita-cita itu dapat tercapai dimulai dari perubahan cara berfikir (*mainsett*) seluruh lapisan masyarakat dan tentu membutuhkan waktu yang relatif tidak sebentar. Lebih jelas, Islam memiliki sistem tersendiri yang pernah berjalan berabad-abad lamanya sehingga ekonomi berbasis riba tidak patut dijadikan patron normatif bagi perkembangan ekonomi syariah selanjutnya.

Ekonomi syariah di era modern saat ini telah memasuki babak baru hingga menyebabkan tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks daripada era-era sebelumnya. Semua dituntut bergerak maju dengan menciptakan inovasi-inovasi, khususnya dalam tata kelola keuangan sebagai bentuk penyesuaian diri serta dalam rangka memperkuat daya saing di tingkat

---

<sup>10</sup> Ramadān Ḥāfiẓ, *Mauqif asy-Syarī'ah*..., hlm. 13 – 14.

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press; 2000), hlm. 43.

internasional. Ada sejumlah produk akad yang dirilis lembaga keuangan syariah masa kini tidak ditemukan bentuk spesifiknya di masa lalu. Akad-akad model baru semacam itu pada umumnya merupakan hasil sintesis akad-akad sebelumnya yang kemudian diramu sedemikian rupa hingga menjadi akad yang terpadu misalnya dalam bentuk multi akad (*hybrid contract/al-‘uqūd al-murakkabah*). Akad *al-qard al-hasan* dijadikan sebagai akad mandiri bagi peneliti juga merupakan inovasi baru mengingat akad ini dalam hukum fikih masa lampau terintegrasi dalam akad *al-qarḍ*: yaitu sebuah akad yang tidak berdiri sendiri dan bersifat insidental. Fenomena semacam ini mengharuskan semuanya agar berpandangan terbuka mengingat inovasi-invosi semacam ini kedepan akan bermunculan lebih banyak lagi. Lebih jelas, inovasi dalam bentuk apapun harus diapresiasi selama di sana tidak terindikasi ribawi, terlebih ketiadaan riba merupakan karakteristik ekonomi syariah.

Nuansa baru sebagaimana penjelasan di atas dalam dunia pemikiran Islam memicu perdebatan para cendekiawan Muslim antara yang pro aliran ekonomi konvensional, pro ekonomi syariah, dan yang pro aliran pembaharuan. Di kalangan mereka terdapat sejumlah pandangan mengenai konsep pinjaman berbunga yang oleh mayoritas kaum Muslimin lazim disebut riba. Di antara pokok masalahnya ialah dalam menyikapi satu persoalan masing-masing di antara mereka memiliki sikap dan penilaian berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan persoalan itu merupakan riba yang diharamkan, ada yang mengatakan riba yang diperkenankan (*rukhsah*), dan sebagian lain mengatakan bukan riba yang halal dijalankan. Muḥammad ‘Abduh, ‘Abdul Wahhāb Khalāf

dan Ali Jum'ah diantara sosok yang mencoba berdamai dengan bunga bank meski pendapatnya ditolak oleh mayoritas ulama.<sup>12</sup>

Menyikapi beragam pandangan di atas, salah seorang pakar tafsir kenamaan Mesir, Sya'rāwiyy, mengatakan bahwa orang yang beralasan hukum riba berlaku hanya pada bunga pinjaman berlipat ganda (*ad'āfan mudā'afah*) merupakan pemahaman yang tidak dapat diterima. Ia merasa heran dengan orang secara nyata begitu bersemangat menghalalkan sesuatu yang jelas dilarang oleh agama. Dalam kesempatan yang sama, Al-Ghazāliyy, salah satu ulama Al-Azhar juga mengatakan bahwa dogma yang tertulis dalam semua kitab suci agama-agama secara jelas melarang riba. Bahkan dalam sejarahnya para pemeluk agama-agama dikatakan tidak mempraktikkan riba.<sup>13</sup> Bila demikian diharapkan paradigma keuangan syariah, khususnya dalam persoalan akad *al-qard*, harus tetap pada prinsip semula dengan berpegang teguh pada *at-ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *ta'amul* (bekerja sama), bukan melulu berorientasi pada laba (*ta'awanū 'alā al-birri wa at-taqwā*).<sup>14</sup> Sementara untuk mewujudkan ini diantaranya dapat berharap pada lembaga fatwa DSN-MUI dan AAOIFI mengingat keduanya merupakan rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan produk keuangannya.

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), VII: 64.

<sup>13</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwiyy, *Fawāid al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām* (Kairo: Dār as-Safwah li an-Nasyr, 1997 M./1418 H.), hlm. 5 – 11.

<sup>14</sup> Manṣūr al-Bāhūtiyy, *Kasysyāf al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā'*, cet. ke-1 (Bairūt: 'Alam al-Kutub, 1417 H./1997 M.), III: 45.

Dalam konteks Indonesia, ada sebuah data menarik yang dikemukakan Hamidi (2017) terkait akad *al-qard* atau *al-qard al-hasan* sebagai produk bisnis keuangan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2015 besar pembiayaan *al-qard al-hasan* di Bank Syariah Nasional mencapai Rp 10,6 triliun atau sekitar 1,85 persen dari total pembiayaan syariah. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada 2014 yang mencapai Rp. 11,46 triliun atau sekitar 3,2 persen. Rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir pembiayaan *al-qard al-hasan* pernah mencapai hampir tujuh persen dari total pembiayaan pada 2010.<sup>15</sup> Data ini memperjelas bahwa akad *al-qard* merupakan salah satu diantara produk akad lembaga keuangan syariah yang amat penting dikaji agar gambaran hukumnya dapat diketahui secara utuh dan sempurna.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan konsep akad *al-qard* menurut fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai fatwa tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman akad *al-qard* menurut fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa skala internasional

---

<sup>15</sup> M. Luthfi Hamidi, “Bank Syariah, Asosial?” dalam: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-bank-syariah-asosial>. Diakses pada 6 April 2017.

AAOIFI. Peneliti juga akan memaparkan bagaimana perbedaan fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut serta seberapa tingkat ketepatannya. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI bila kemudian dijadikan legalitas produk bisnis keuangan di lembaga keuangan syariah didukung dengan teori *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya perekonomian berbasis syariah di era kekinian.
  - b. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya dalam mengkaji perkonomian berbasis syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan bermanfaat bagi para pemegang otoritas pekonomian berbasis syariah dalam menentukan kebijakan dalam upaya menciptakan sekeligus mengembangkan produk keuangan yang ada.
  - b. Diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan dalam menentukan aktivitas perekonomiannya berkaitan dengan akad *al-qard*.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan akad *al-qard* telah banyak diulas para peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan. Karya yang dihasilkan juga beragam, baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Setidaknya penulis berusaha mengkaji tiga penelitian yang ada sebelumnya:

*Pertama*, penelitian Santoso (2015) dengan judul: “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*”. Dalam penelitiannya, Santoso menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan *al-qard* pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Bank BRI Cabang Semarang agar peminjam mengembalikan. Di sana juga menganalisis sanksi yang diberikan Bank BRI Cabang Semarang dalam hal peminjam tidak mengembalikan pinjaman.

Rumusan masalah yang diberikan mencakup tiga pertanyaan besar mengenai bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, upaya apa yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Semarang agar nasabah mengembalikan pinjaman, dan apa sanksi sekaligus penyelesaian Bank BRI Syariah Cabang Semarang dalam hal nasabah tidak mengembalikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang bank syariah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat

dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *qard* diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian maksimum 12 (dua belas) bulan. Apabila peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman, Bank BRI Syariah Cabang Semarang akan menghapus file *qard* peminjam. Hanya saja penelitian ini tidak membidik akad *al-qard* dari aspek hukum syariahnya.

Kedua, penelitian Badrudin (2011) berjudul: “*Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011)*”. Penelitian ini terkait dengan studi kasus manajemen pembiayaan *al-qard al-hasan* di BPRS Metro madani yang dinilai memiliki pembiayaan relatif tinggi. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi aspek pembiayaan *al-qard al-hasan* di BPRS Metro madani yang dinilai cukup tinggi, sejauh mana penerapan POAC oleh BPRS Madani, serta kesesuaian antara teori manajemen dengan praktik BPRS Metro Madani.

Sesuai penjelasannya penelitian ini bersifat konfirmatif terhadap manajemen pembiayaan *al-qard al-hasan* di BPRS Metro Madani yang memiliki porsi pembiayaan relatif tinggi melalui pendekatan *phenomenology* dengan model deskriptif. Data yang digunakan berupa data eksternal, yaitu data dari

penelitian sebelumnya serta teori-teori yang mendukung serta internal yaitu sebuah kesimpulan yang diambil oleh peneliti.

Hasil penelitiannya ialah manajemen POAC untuk pembiayaan *al-qard al-hasan* di BPRS Metro Madani dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip *al-qard*. Ketidaksesuaianya terletak pada aspek implementasinya seperti keharusan adanya jaminan atau adanya orang yang bertanggung jawab. Selain itu penerima pembiayaan *al-qard al-hasan* juga dibatasi pada dua kategori orang yang sakit dan *gharim*, yaitu orang yang terlilit utang.

Ketiga, penelitian Purwadi (2014) dengan judul: “*Al-Qard dan al-Qard Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*”. Pokok persoalan yang diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Perbankan syariah di Indonesia, perkembangan dan pelaksanaan ketentuan hukum produk *al-qard* dan *al-qard al-hasan* sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Fokus penelitian dilakukan pada pembatasan ruang lingkup dan bagaimana *al-qard* dan *al-qard al-hasan* dalam kaitannya dengan upaya apa yang dilakukan perbankan syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban sosial (*corporate social responsibility*). Proses analisisnya bersifat normatif,

yakni sebuah kajian yang mengambil ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum dari sistem hukum umum maupun sistem hukum Islam. Pendekatan kajiannya menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis normatif (*normative approach analysis*).

Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Penerapan program CSR tersebar dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sosial, agama, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta melalui produk pembiayaan. *Kedua*, dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan *al-qard* dan *al-qard al-hasan* sebagai CSR pada perbankan syariah. PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip *al-qard* dan *al-qard al-hasan* dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penelitian di atas secara umum belum mengurai secara mendalam aspek hukum syariahnya kecuali merefer pada fatwa DSN-MUI dan hukum positif perundang-undangan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada aspek kejelasan hukum serta aspek *maqāṣid*-nya. Lebih spesifik, penelitian ini secara komparatif mengacu pada rumusan Fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa skala internasional AAOIFI dipadukan dengan pendapat para pakar fikih lintas mazhab melalui pendekatan

teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda dan didukung dengan teori *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.

## F. Kerangka Teoretis

Dalam tulisan ini, peneliti akan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* gagasan Auda sebagai teori utama (*grand theory*) serta *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai teori pendukung (*secondary theory*). Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dijadikan sebagai norma serta kerangka berfikir filosofis dalam membaca hukum-hukum, baik yang ada di seluruh bagian hukum Islam, keputusan-keputusan hukum dalam bab *al-qard* secara umum, maupun produk fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang *al-qard*. Lebih spesifik teori ini akan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariah yang terkandung dalam akad *al-qard* di masing-masing tingkatan serta ruang lingkupnya.

Sebelum masuk ke ranah hukum, peneliti akan menggunakan teori bantu berupa *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. Fungsi teori ini untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang ada dalam fatwa skala nasional DSN-MUI maupun fatwa skala internasional AAOIFI sebagai legalitas lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan produk bisnis akad *al-qard* tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang ada dalam hukum syariah. Tahap selanjutnya akan berbicara hukum spesifik akad *al-qard* sebagai bagian dari *al-ahkām an-nawāzil* (ketentuan hukum permasalahan baru yang terjadi di tengah masyarakat). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Analisis penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser Auda. Kata *maqāṣid* dalam pengertian Auda dijelaskan sebagai sasaran baik diberlakukannya suatu hukum. Ia merupakan tujuan-tujuan ke-Ilahi-an dan konsep moral dalam hukum-hukum.<sup>16</sup> Ia juga bermaka nilai-nilai filosofis di balik hukum-hukum.<sup>17</sup> Secara garis besar, landasan yang digunakan dalam analisis menggunakan tiga pemikiran Jasser Auda:

*Pertama*, perbaikan jangkauan (*mu'ālajah al-mustawayāt*). Teori ini memiliki tiga tingkatan yang terdiri dari *al-maqāṣid al-'āmmah*, *al-maqāṣid al-khāṣṣah*, dan *al-maqāṣid al-juz`iyyah* sebagai perbaikan dari konsep *maqāṣid* masa lampau. Tahapan ini akan meninjau masing-masing tiga tingkatan tersebut yang di dalamnya memuat fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI tentang *al-qard*. Hal ini untuk memastikan apakah seluruh tingkatan tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan ke-Ilahi-an yang dikehendaki *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta seluruhnya tidak saling bertentangan.

*Kedua*, pengembangan ekonomi kognitif (*al-iqtisad al-ma'rifi*) melalui spirit *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tahapan ini akan mengamati seberapa kesesuaian fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI serta peran fatwa bila dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan

---

<sup>16</sup> Jāsir 'Audah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Ka Falsafah li at-Tasyrī'i al-Islāmiy: Ru'yah Manzūmah*, (London: Al-Ma'had al-'Ālamīy li al-Fikr al-Islāmīy, 2012), hlm. 13-14.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

produk keuangan berupa akad *al-qard*. Proses ini untuk memastikan apakah fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI memiliki dampak signifikan menjadi bagian dari ekonomi kognitif di tengah keterpurukan kondisi umat Islam saat ini.

*Ketiga*, skala prioritas (*al-aulawiyāt*). Tahapan ini akan menganalisis secara keseluruhan fatwa DSN-MUI dan fatwa AAOIFI mengenai akad *al-qard* serta status *al-qard* bila dijadikan produk bisnis di lembaga keuangan syariah. Proses analisis akan dilakukan secermat mungkin mengenai keberadaan fatwa serta produk bisnis keuangan *al-qard* -yang umumnya merefer pada fatwa tersebut- apakah kemunculannya merupakan sesuatu yang mutlak tak bisa ditawar. Di samping itu analisis juga akan mengarah pada tingkat kesesuaianya dalam perspektif skala prioritas (*al-aulawiyāt*)

## 2. Teori *al-Qawāid al-Fiqhīyyah*

Selain teori di atas, proses analisis penelitian ini akan didukung dengan teori *al-qawāid al-fiqhīyyah* guna mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum secara umum yang ada dalam akad *al-qard* yang kemudian diaplikasikan pada fatwa skala nasional DSN-MUI dan fatwa skala internasional AAOIFI. *Al-qawāid al-fiqhīyyah* secara terminologi diartikan sebagai aturan umum atau universal (*kulliyyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya

(*juz' iyyah*). Peneliti dalam proses analisisnya akan berpijak pada dua dari lima kaidah dasar (*al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā*), yaitu:

*Pertama*, kaidah الأمور بمقاصدھا, yaitu setiap perkara (perbuatan) ditentukan berdasarkan niatnya. Teori ini akan mengamati seperti apa status niat para pihak saat menjalankan akad *al-qard* di lembaga keuangan syariah sebagai representasi fatwa DSN-MUI dan AAOIFI. Kaidah ini digunakan untuk mengukur sejauh mana ketulusan para pihak dalam berbuat kebijakan dan tolong-menolong serta untuk memastikan tidak adanya motif keuntungan di antara mereka saat berakad *al-qard*. Pembacaan juga akan didukung dengan kaidah-kaidah lain yang lahir dari kaidah ini diantaranya العبرة في العقود للمقاصد والمعانى، لا الألفاظ والمبانى, yaitu patokan dalam berakad diambil dari maksud/tujuan dan maknanya bukan ungkapan dan bentuknya.

*Kedua*, kaidah العادة محكمة, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kaidah ini akan digunakan untuk mengamati adat kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat saat mereka melakukan akad *al-qard* di lembaga keuangan syariah sebagai representasi fatwa. Barometer ini digunakan untuk memastikan tidak ada kebiasaan memberi tambahan dari jumlah nilai yang diutangkan dalam akad *al-qard* di lembaga keuangan syariah. Dalam proses menganalisis peneliti juga akan menggunakan kaidah-kaidah turunan yang lahir dari kaidah ini, diantaranya المعرف عرفاً كالمشروع شرعاً, berarti sesuatu yang dikenal secara adat kebiasaan seperti persyaratan yang diungkapkan menjadi syarat.

3. *Aḥkām an-Nawāzil*, yaitu hukum-hukum kontekstual yang diambil dari ketentuan fatwa maupun fikih lintas mazhab berkaitan dengan akad *al-qard*. Kata *al-qard* secara etimologi ialah *al-qat’u* yang berarti potong atau putus, sementara secara etimologi ia berarti penyerahan harta kepada orang lain sebagai bentuk kemurahan hati agar kelak dikembalikan seperti semula.<sup>18</sup> Menurut mayoritas ulama akad ini memiliki tiga rukun berupa kesepakatan (*iżāb wa qabūl/ṣigah*), para pihak (*muqrīd wa muqtariḍ/’āqidain*) dan obyek yang utangkan (*syai` muqrad/ma’quḍ ‘alaih*).<sup>19</sup> Menurut Hanafiyah rukunnya hanya kesepakatan (*ṣigah*), karena hanya dengan kesepakatan menyebabkan para pihak dan obyek akad menjadi sebuah keniscayaan.<sup>20</sup>

Masing-masing rukun dalam akad *al-qard* memiliki sejumlah syarat. Perama, syarat kesepakatan (*ṣigah*) dapat menggunakan kata *qard*, *salaf*, atau kata-kata lain yang sudah lazim dimengerti oleh para pihak sebagai bentuk ijab kabul,<sup>21</sup> baik berupa perkataan maupun perbuatan sebagai tanda persetujuan. Makna ijab adalah pernyataan pihak pertama yang menetapkan kesepakatannya dalam bertransaksi terhadap pihak kedua baik dalam proses penyerahan obyek akad maupun dalam penerimaan, sementara makna kabul ialah jawaban kesepakatan dari pihak

<sup>18</sup> Ibnu ‘Ābidīn ‘Alaih, *Radd al-Muhtār ‘alā ar-Radd al-Mukhtār*, (Riyād: Dār Alām al-Kutub, 2003 M./1423 H.), VII: 388;

<sup>19</sup> An-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Huhaẓẓab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th), XII: 253.

<sup>20</sup> Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū’ah.....*, XXX: 200.

<sup>21</sup> Bahkan menurut Muḥammad Amīn akad ini dapat menggunakan kalimat *i’ārah* yang dalam bahasa Indonesia juga berarti meminjam. Lihat: Muḥammad Amīn, *Radd al-Muhtār ‘alā Durr al-Mukhtār*, (Riyād: Dār ‘Alām al-Kutub, 2003), VII: 388.

kedua dengan prinsip saling merelakan.<sup>22</sup> Kabul disyaratkan harus dilakukan secara langsung sebelum ijab dicabut secara permanen dari pihak pertama.<sup>23</sup>

*Kedua*, syarat keberadaan para pihak (*'āqidain*) yang terdiri dari pihak pemberi utang (*muqrid*) dan pihak penerima utang (*muqtarid*). Ulama tidak terjadi perbedaan mengenai syarat pihak pemberi utang harus orang yang memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah li at-taṣarruf*) sehingga tidak sah bagi anak kecil atau orang gila melakukan akad *al-qard*.<sup>24</sup> Bagi pihak penerima utang, menurut Syāfiyyah harus orang yang memiliki kecakapan bekerja (*ahliyyah al-mu'āmalah*)<sup>25</sup> dan atau kecakapan bertindak (*ahliyyah li at-taṣarruf*), bukan hanya cakap berbuat baik (*ahliyyah at-tabarru'*).<sup>26</sup> Itu sebabnya orang yang sedang mengalami kepailitan bagi Syāfiyyah diperbolehkan berakad *al-qard* selama ia memiliki kecakapan bekerja.<sup>27</sup>

*Ketiga*, syarat obyek yang diutangkan harus memenuhi beberapa kriteria: a) harus berupa harta yang memiliki padanan (*miśliyyāt*), yaitu harta yang tidak banyak memiliki perbedaan dari aspek nilai, timbangan atau ukuran; b) segala harta yang dapat ditransaksikan dalam akad *salam*

<sup>22</sup> Sa'd a-dīn Muḥammad al-Kibbiy, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*..., hlm. 51.

<sup>23</sup> Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah*....., XXX: 212.

<sup>24</sup> As-Sarakhsiy, *al-Mabsūt*, cet. ke-1, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1414 H.), hlm. XIV: 41; An-Nawawi, *al-Majmū'*..., XII: 253; Ibn al-Qudāmah, *al-Mugniy*, cet. ke-1, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1405), IV: 383.

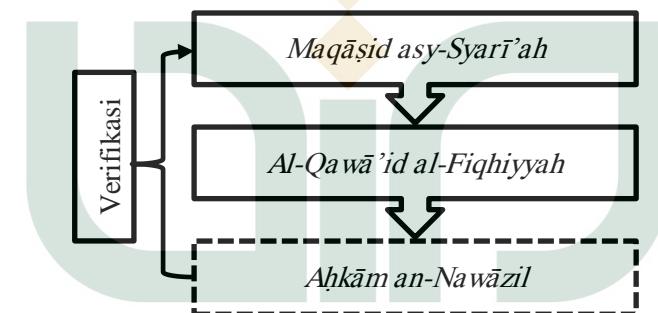
<sup>25</sup> Ar-Ramliy, *Nihāyah al-Muhtāj*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1984), IV: 225.

<sup>26</sup> An-Nawawi, *al-Majmū'*..., XII: 253

<sup>27</sup> Sulaimān al-Jumal, *Hāsyiyah al-Jumal 'alā Syarh al-Manhaj*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 53.

(pesanan) berarti dapat dijadikan obyek akad *al-qard* menurut kriteria Syāfiyyah.<sup>28</sup> Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, keberadaan fungsi atau kegunaan (*manfa’ah*) dari sebuah harta dapat dijadikan obyek akad *al-qard*;<sup>29</sup> c) obyek akad harus diketahui para pihak, baik ukuran maupun sifat dan ini tidak terjadi perbedaan di kalangan ulama.<sup>30</sup>

Setelah menjelaskan kerangka teoretis di atas, berikut ini akan dijelaskan mekanisme analisis melalui dua teori di atas. Teori *maqāṣid asy-syarī’ah* akan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariah dalam pemberlakuan akad *al-qard*, teori *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* akan mengidentifikasi rumusan-rumusan umum hukum fikihnya, baru kemudian masuk pada ranah hukum kontekstualistik (*ahkām an-nawāzil*). Setelah ketentuan hukum itu diketahui, proses selanjutnya akan diverifikasi oleh teori *maqāṣid asy-syarī’ah*.



Gambar 1: Hierarki teoretis dalam menganalisis akad *al-qard* dan tentu juga berlaku pada akad-akad yang lain.

<sup>28</sup> An-Nawawi, *al-Majmū’*..., XII: 259.

<sup>29</sup> Ibnu at-Taimiyah, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah*, (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1978), hlm. 476.

<sup>30</sup> Ibnu Ḥajar al-Haitamiy, *Tuhfah al-Muhtāj*, (Bairūt: Dār Iḥyā’ at-Turaš al-‘Arabiyy, 1983), V: 44; Ibnu al-Quḍāmah, *al-Mugniy*..., IV: 386.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat ilmiah sesuai kerangka teoretis yang telah disebutkan di atas. Proses penelitiannya menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-analitis yang diambil dari kepustakaan mengenai akad *al-qard* yang bersifat normatif-yuridis dengan cara menganalisis bahan-bahan primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan fatwa skala nasional DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard* dan fatwa skala internasional AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang *al-Qard*; bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai ketentuan hukum fikih lintas mazhab terkait akad *al-qard* diantaranya *al-Majmū’ Syarḥ al-Huhazzab* karya an-Nawawī, *al-Mugnī* karya Ibn al-Qudāmah, *al-Mabsūt* karya as-Sarakhsī, *Radd al-Muhtār* karya Ibn ‘Ābidīn, *Kasyṣyāf al-Qanā’* karya al-Bahūtī, dan lain-lain; bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Indonesia, kamus bahasa Arab dan ensiklopedi hukum Islam.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan dimaksud dengan cara menghimpun: data primer yang terdiri dari ketentuan fatwa skala nasional

DSN-MUI dan fatwa skala internasional AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang *al-Qard*; data sekunder terdiri dari berbagai hukum fikih lintas mazhab terkait akad *al-qard* diantaranya *al-Majmū’ Syarḥ al-Huhazzab* karya an-Nawawī, *al-Mugnī* karya Ibn al-Qudāmah, *al-Mabsūt* karya as-Sarakhsī, *Radd al-Muhtār* karya Ibn ‘Ābidīn, *Kasisyāf al-Qanā’* karya al-Bahūtī, dan lain-lain, serta; data tersier berupa kamus hukum, kamus Indonesia, kamus bahasa Arab dan ensiklopedi hukum Islam.

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui komparasi bahan yang diperoleh melalui kepustakaan. Selanjutnya proses serta hasil analisis akan dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis. Kesimpulan akan diambil berdasarkan penelitian, hasil analisis serta dilengkapi dengan saran-saran yang dinilai bermanfaat.

## H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis akan disusun dalam bentuk laporan akhir melalui sistematika penulisan saling berkaitan sebagaimana penjelasan berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Di dalam bab ini akan mengurai teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri atas dua sub-bab meliputi teori utama *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda dan teori bantu *al-qawā'id al-fiqhiyyah*.

Bab III berisi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya berisi tentang penjelasan prinsip akad *al-qard* serta ruang lingkupnya perspektif fatwa skala nasional yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, dan fatwa skala internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Keduanya dijasajikan secara lengkap.

Bab IV berisi tentang analisis peneliti mengenai produk fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dan fatwa AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang *al-qard* serta dipadukan dengan pandangan para pakar fikih lintas mazhab. Uraian juga mencakup celah-celah yang ada dalam masing-masing fatwa serta sejumlah pembacaan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap fatwa *al-qard* apabila dijadikan produk bisnis keuangan di lembaga keuangan syariah.

Bab V adalah penutup. Di dalamnya akan memaparkan kesimpulan serta jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Apabila terdapat fakta baru tetapi tidak terurai dalam jawaban, fakta tersebut akan dimasukkan ke dalam saran-saran.

Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab di atas juga akan memuat daftar pustakan yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis. Dan yang terakhir akan disertakan lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V: P E N U T U P

### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui uraian panjang di atas, peneliti akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI memiliki sejumlah perbedaan dan kesamaan, baik dari aspek wilayah jangkauan, butir-butir fatwa, maupun dampak yang ditimbulkan dari fatwa-fatwanya. Perbedaan dan kesamaan ini akan dirangkum dalam penjelasan berikut ini:
  - a. Wilayah jangkauan serta pengaruh fatwa DSN-MUI hanya berskala nasional menyentuh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, sementara fatwa AAOIFI lebih global meliputi Timur-Tengah, Asia, dan sebagian Eropa.
  - b. Fatwa yang dikeluarkan AAOIFI jauh lebih komprehensif daripada fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI khususnya tentang *al-qard*. Butir-butir fatwa AAOIFI banyak menuangkan redaksi antisipatif sementara fatwa DSN-MUI memiliki sejumlah celah yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah.
  - c. Fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI sama-sama tidak menuangkan niat (*an-niyyah*) dalam butir-butir fatwanya meski niat merupakan unsur penting bagi kaum Muslimin dalam menjalankan aktivitasnya.
  - d. Perbedaan paling mendasar di antara keduanya terletak pada butir adat kebiasaan (*al-‘ādah*) yang dituangkan dalam fatwa AAOIFI,

namun tidak diakomodir dalam fatwa DSN-MUI. Padahal adat kebiasaan merupakan salah satu diantara pijakan penting dalam hukum Islam.

- e. Ketiadaan adat kebiasaan (*al-'ādah*) dalam butir-butir fatwa DSN-MUI menjadi celah bagi lembaga keuangan syariah menerbitkan akad *al-qard* untuk meraih keuntungan hingga rentan digunakan legitimasi ajang praktik riba.

2. Pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* mengenai fatwa DSN-MUI dan AAOIFI terdapat beberapa catatan kaitannya dengan perbaikan jangkauan (*mu'ālajah al-mustawayāt*), ekonomi kognitif (*al-iqtisād al-ma'rīfī*), dan skala prioritas (*al-aulawiyyāt*). Penjelasannya sebagai berikut:

a. Ada indikasi ketidakselarasan jangkauan antara *al-maqāṣid al-juz'iyyah* dengan jangkauan *maqāṣid* di atasnya, yaitu *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah*. Masing-masing dari *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* sama-sama memiliki tujuan bagimana akad *al-qard* menjadi basis pengembangan ekonomi melalui pertolongan pada masyarakat kurang mampu, sementara dalam *al-maqāṣid al-juz'iyyah* cenderung digunakan untuk meraup keuntungan dari orang-orang kurang mampu.

b. Akad *al-qard* berpotensi dijadikan sebagai pengembangan ekonomi kognitif (*al-iqtisād al-ma'rīfī*), yaitu ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang finalnya umat Islam memiliki daya saing di tingkat internasional.

- c. Skala prioritas (*al-aulawiyyāt*) dalam akad *al-qard* harus dirumuskan ulang agar keluarnya produk ini dapat tepat mengenai sasaran pada orang yang kurang mampu daripada diperuntukkan perusahaan-perusahaan raksasa yang seringnya hanya menghasilkan kebutuhan konsumtif.

Demikian ini adalah kesimpulan-kesimpulan peneliti sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

## B. Saran-Saran

Menyadari adanya keterbatasan dalam tulisan ini, peneliti memberi sejumlah saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya serta para pemegang otoritas kebijakan sebagai berikut:

### 1. Untuk Para Peneliti Selanjutnya

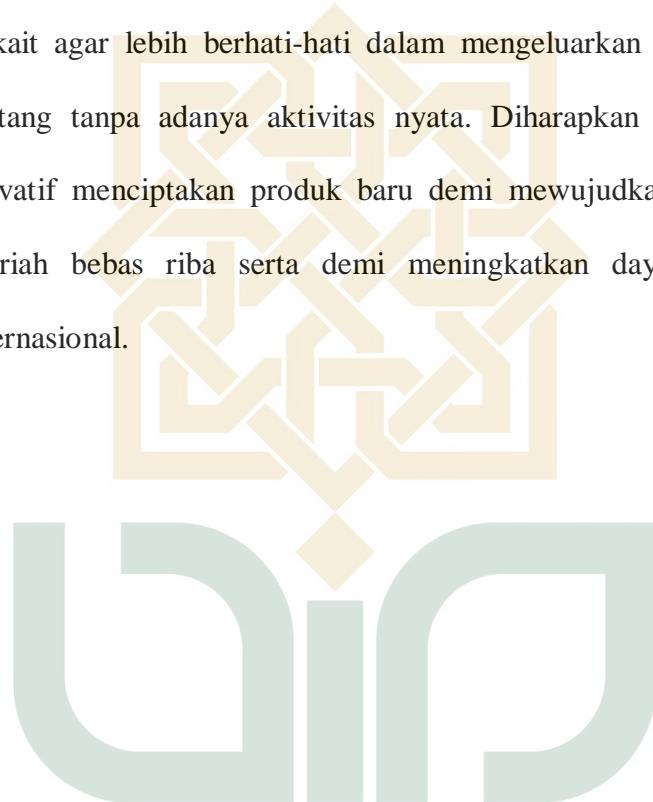
*Pertama*, berharap pada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara komprehensif dan sistematis menyertakan fatwa-fatwa lintas mazhab dan pemiki-pemikir modern. *Kedua*, berharap peneliti selanjutnya agar memetakan kultur dan budaya masyarakat lebih luas untuk menentukan hukum praktik *al-qard* kaitannya dengan niat (*niyyah*) dan adat kebiasaan ('urf/'ādah).

### 2. Untuk Para Pemegang Kebijakan

*Pertama*, berharap pada DSN-MUI agar lebih komprehensif dalam memberikan fatwa agar tidak rentan dijadikan legitimasi pihak lembaga keuangan syariah dalam melakukan praktik riba. DSN-MUI juga diharap

meningkatkan kinerjanya dalam upaya memonitoring tiap-tiap produk keuangan yang diterbitkan lembaga keuangan syariah demi menekan terjadinya kesalahpahaman memaknai fatwa. Selain itu DSN-MUI juga diharap menerbitkan ulang fatwa-fatwa yang banyak memiliki celah – khususnya fatwa *al-qard*- demi meningkatkan kredibilitas fatwa-fatwanya.

*Kedua*, berharap kepada lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan produk akad utang-piutang tanpa adanya aktivitas nyata. Diharapkan pula kedepan lebih inovatif menciptakan produk baru demi mewujudkan cita-cita ekonomi syariah bebas riba serta demi meningkatkan daya saing di tingkat internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur`an/Illu Al-Qur`an/Tafsir**

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, t.k.: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Zuhailiy, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āşir, 1418 H.

### **B. Hadis/Illu Hadis**

‘Ainiy, Badr ad-Dīn al-, *‘Umdah al-Qāri` Syarḥ Ṣahīḥ al-Bukhāriy*, Dār Ihyā` at-Turāś, t.th.

Syāfi’ī, Muhammad al-Amīn asy-, *al-Kaukab al-Wahhāj Syarḥ Ṣahīḥ Muslim*, Makkah: Dār al-Minhāj, 2008.

### **C. Fikih/Kaidah Fikih/Usul Fikih**

‘Audah, Jāsir, *al-Ijtihād al-Maqāṣidiy min at-Taṣawwur al-Uṣūly ilā at-Tanzīl al-‘Amaliy*, Bairūt: asy-Sabakah al-‘Arabiyyah li al-Abḥāš wa an-Nasyr, 2013.

‘Audah, Jāsir, *Maqāṣid asy-Syarī’ah Ka Falsafath li at-Tasyrī’i al-Islāmiy*: *Ru’yah Manzūmah*, London: Al-Ma’had al-‘Ālamīy li al-Fikr al-Islāmīy, 2012.

‘Audah, Jāsir, *Maqāṣid asy-Syarī’ah; Dalīl li al-Mubtadi-īn*, London: Al-Ma’had al-‘Ālamīy li al-Fikr al-Islāmīy, 1981.

Aḥmad, Sa’d Ibnu, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Arab Saudi: Dār ibn al-Jauziy, 1429 H.

Aḥsan, Muhammad Nūr al-, *At-Takmilah ‘alā Syarḥ al-Waraqāt li al-Imām Jalāl ad-Dīn al-Mahalliy ‘alā al-Waraqāt Fī Uṣūl al-Fiqh li al-Imām al-Haramain*, cet. ke-1, t.t.: Ma’had al-Islāmiy al-Hasaniy, 2017.

Aḥsan, Muhammad Nūr al-, *Dalīl al-Mahīd*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Razka Pustaka, 2018.

Alaih, Ibnu ‘Ābidīn, *Ad-Durr al-Muhtār ‘alā Radd al-Mukhtār*, Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 2003 M./1423 H.

Anṣāriy, Zakariya al-, *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj aṭ-Tullāb*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1418 H.

Azhary, Sulaimān al-, *Hāsyiyatu al-Jumal*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

Bāhūtiy, Maṇṣūr al-, *Kasysyāf al-Qanā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, cet. ke-1, Bairūt: ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1997 M.

Baijūjiy, Ibrāhim al-, *Hāsyiyah asy-Syaikh Ibrāhim al-Baijūjiy*, cet. ke-2, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1999 M./1420 H.

Haitamiy, Ibnu Ḥajar al-, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983 M./1357 H.

Jauziyyah, Ibnu al-, *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamīn*, Bairūt: Dār al-Jail, 1973.

Jumal, Sulaimān al-, *Hāsyiyah al-Jumal 'alā Syarḥ al-Manhaj*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhibah, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Mālikiy, Abū al-Ḥasan al-, *Kifāyah at-Ṭālib ar-Rabbāniy*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1412 H.

Muqriy, Aḥmad al-, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr*, Kairo: Maktabah al-Amīriyyah, t.th.

Nadwi, Ali Aḥmad al-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, cet. ke-5, Beirut: Dār al-Qalam, 2000.

Nawawi, An-, *al-Majmū' Syarḥ al-Huhaḍab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.

Qudāmah, Ibn al-, *al-Mugniy*, cet. ke-1, Bairūt: Dār al-Fikr, 1405.

Raisūniy, Aḥmad ar-, *Madkhāl ilā Maqāṣid asy-Syarī'ah*, cet. ke-1, Kairo: Dār al-Kalimah, 2013 M/1434 H.

Ramliy, Ar-, *Nihāyah al-Muhtāj*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1984.

Sadlān, Ṣalih bin Ganīm as-, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra'a minhā*, Riyāḍ: Dār Balnasah, 1417 H.

Sarakhsiy, As-, *al-Mabsūṭ*, cet. ke-1, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1414 H.

Suyūṭiy, Jalāl ad-Dīn as-, *al-Asybāḥ wa an-Naẓāir*, Riyāḍ: Niār Muṣṭafā al-Bāz, 1997.

Syairāzī, Ibrāhīm asy-, *At-Tanbīh fī al-Fiqh asy-Syāfi'i*, Bairūt: 'Alam al-Kutub, 1403.

Syarwāniy, Abd al-Ḥamīd asy-, *Hāsyiyah asy-Syarwāniy 'Alā Tuḥfat al-Muhtāj*, Bairūt: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabiyy, 1983 M./1357 H.

Syāṭibiy Asy-, *al-Muwāfaqāt*, cet. ke-1, t.t.: Dār ibn 'Affān, 1997 M./1417 H.

Syirbīniy, Syams ad-Dīn asy-, *Mugnī al-Muhtāj*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Aalamiyyah, 1994 M./1415 H.

Taimiyyah, Ibnu at-, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah*, Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1978.

Zarqā, Muḥammad az-, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Zuhailiy, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

#### D. Ekonomi Islam

'Abdurrahmān, Ramḍan Hāfiẓ, *ṣundūq at-Taufīr wa Syahādāt al-Istiṣmār, al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah wa al-Badīl 'anhā, wa at-Ta'mīn 'alā al-Anfus wa al-Amwāl*, cet. 9, Kairo: Dār as-Salām, 2009.

Amir Mahmud dan H. Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga; 2010.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher; 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Aravik, Havis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press; 2000.
- Dawābah, Asyraf Muḥammad, *al-Khidmāt al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār as-Salām, 2013 M./1434 H.
- Dawābah, Asyraf Muḥammad, *Asāsiyyāt al-‘Amali al-Mashrafīyah al-Islāmiyah*, Kairo: Dar as-Salam, 2012 M./1433 H.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fanjarī, Muḥammad Syauqī al-, *al-Maḏhab al-Iqtisād fī al-Islām*, Kairo: al-Hai`ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 2010.
- Hāfiẓ, Ramaḍan, *Mauqif asy-Syarī'ah min al-Bunūk, al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah, at-Ta'mīn*, Kairo: Dār as-Salām, 2009.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ikit, *Akuntasi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kibbiy, Sa'd a-dīn Muḥammad al-, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fī ḫaṣbi al-Islām*, Bairūt: al-Maktabah al-Islāmy, 2002.
- Marilang, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. ke-1, Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Qaraḍāwiyy, Yūsuf al-, *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām*, Kairo: Dār as-Safwah li an-Nasyr, 1997 M./1418 H.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana; 2017, hlm. 129.
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Yusmat, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah; dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Mu'āmalāt al-Māliyāt al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.

#### **E. Kamus Bahasa**

Bagdadiy, Abd al-Qādir al-, *Khazānah al-Adab wa Lubbu Lubābi Lisān al-'Arab*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1998.

Fayyūmiy, Ahmād al-, *al-Miṣbāh al-Munīr*, cet. ke-5, Kairo: al-Maṭba'ah al-Amīriyyah, t.th.

Ibrāhim Muṣṭafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wāṣiṭ*, Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dauliyyah, 2004 M./1425 H.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.

#### **F. Ensiklopedi**

Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2007.

#### **G. Fatwa/Peraturan/Perundang-undangan**

Fatwa AAOIFI nomor 19 tahun 2004 tentang *al-Qard*.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akibat Persetujuan Pasal 1338

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada 26 Juni 2016 M./21 Ramadhan 1437 H.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

#### **H. Lain-Lain**

Suparman, *Pancasila*, cet. ke-1, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.

Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 05/01/Th. XXI, 2 Januari 2018.

## I. Rujukan Web

<http://aoofi.com/about-aoofi/> diakses pada 10 Mei 2018.

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada 27 April 2018.

<https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/> diakses pada 28 Juli 2018.

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa>

[Id&Id=47310](#) diakses pada 29 Desember 2017.

M. Luthfi Hamidi, “*Bank Syariah, Asosial?*” dalam:

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/10/31/ofwb87-bank-syariah-asosial>. diakses pada 6 April 2017

<https://www.uii.ac.id/prof-dr-jasser-auda-jadi-narasumber-diskusi-pembacaan-kontemporer-maqashid-syariah>/ diakse pada 26 April 2018.

<http://akuntansikeuangan.com/organisasi-standar-akuntansi-syariah-internasional-aoofi>/ diakses pada 11 April 2018.

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa>

[Id&Id=47310](#) diakses pada 29 Desember 2017

<https://www.uii.ac.id/prof-dr-jasser-auda-jadi-narasumber-diskusi-pembacaan-kontemporer-maqashid-syariah>/ diakse pada 26 April 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses pada: 27 April 2018.

<https://www.suduthukum.com/2017/11/itikad-baik-dalam-bw-indonesia.html> diakses pada 28 Juli 2018.

<https://buruhmigran.or.id/2015/02/04/12874/> diakses pada 2018.





مَحْكَمَةُ الشَّرِيفِ الْأَنْدَلُسِيِّ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

**AL-QARDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;  
 b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.  
 c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيَّتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاکْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."  
(QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسِرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ (رواه مسلم).

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).*

**مَطْلُ الْغَنِيٌّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)**

*“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).*

**لَيْلَ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).**

*“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).*

**إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)**

*“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).*

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

**الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.**

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

4. Kaidah fiqh:

**كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.**

*“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqrigh) adalah riba.”*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : FATWA TENTANG AL-QARDH  |
| Pertama    | : Ketentuan Umum al-Qardh   |
|            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (<i>muqtaridh</i>) yang memerlukan.</li> <li>2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.</li> <li>3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.</li> </ol> |

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

*Kedua***: Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

*Ketiga***: Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

*Keempat*

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,




---

*Dewan Syariah Nasional MUI*

**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



المعيار الشرعي رقم (19)

القرض



## المحتوى

رقم الصفحة	
323	<b>القديم</b>
324	<b>نص المعيار</b>
324	- 1 نطاق المعيار
324	- 2 تعريف القرض
324	- 3 أركان القرض، وشروطه
324	- 4 أحكام المنفعة المشروطة في القرض
325	- 5 أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض
325	- 6 اشتراط الأجل في القرض، ولزومه
325	- 7 اشتراط عقد في القرض
325	- 8 اشتراط يجعل على الافتراض للغير
325	- 9 نفقات خدمات القرض
326	- 10 أهم التطبيقات المعاصرة للفرض
327	- 11 تاريخ إصدار المعيار
328	<b>اعتماد المعيار</b>
329	<b>الملاحق</b>
331	(أ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
336	(ب) مستند الأحكام الشرعية
	(ج) التعريفات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### التقديم

يهدف هذا المعيار إلى بيان الأحكام الشرعية للقرض، ومنها أحكام المنفعة في القرض، سواءً كانت مشروطة أم غير مشروطة، كما يهدف إلى بيان الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات).<sup>(1)</sup> وكذلك بيان الأحكام الشرعية لبعض التطبيقات التي تحتاج المؤسسات إلى التعامل بها، مثل الحسابات الجارية، والجوازات على القروض، ونفقات خدمات القرض، وكشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها.

والله الموفق،،،



(1) استخدمت الكلمة (المؤسسة/المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية الإسلامية، ومنها المصارف الإسلامية.

### نص المعيار

#### 1. نطاق المعيار

يتناول هذا المعيار القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، سواءً أكانت المؤسسة مقرضة أم مقترضة.  
ولا يتناول هذا المعيار ما ليس قرضاً، مثل ثمن البيع الآجل والحسابات الاستثمارية؛ لأن لها معايير خاصة  
بها.

#### 2. تعريف القرض

القرض تمثيلك مال مثلي لمن يلزمك رد مثلك.

#### 3. أركان القرض، وشروطه

- 1/3 يعقد القرض بالإيجاب والقبول بلفظ القرض والسلف، وبكل ما يؤدي معناها من قول أو فعل.
  - 2/3 يشترط في المقرض أهلية الشريع.
  - 3/3 يشترط في المقترض أهلية التصرف.
  - 4/3 يشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقدماً معلوماً مثلياً.
- 1/4/3 يملك المقترض محل القرض (المال المقرض) بالقبض، ويثبت مثله في ذاته.
  - 2/4/3 الأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.

#### 4. أحكام المنفعة المشروطة في القرض

- 1/4 يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ريا، سواءً أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر، وسواءً أكانت الزيادة عيناً أم منفعة، وسواءً أكان اشتراط الزيادة في العقد أم عند تأجيل الوفاء أم خلال الأجل، وسواءً أكان الشرط منصوصاً عليه أم ملحوظاً بالعرف.
- 2/4 يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.

### 5. أحكام المنفعة غير المشروطة في القرض

1/5 لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض.

2/5 تجوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء من غير شرط ولا عرف، سواءً أكان محل القرض نقوداً أم غيرها.

### 6. اشتراط الأجل في القرض، ولو فيه

يجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، وليس للمقرض مطالبه به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب.

### 7. اشتراط عقد في القرض

لا يجوز اشتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض.

### 8. اشتراط الجعل على الاقتراض للغير

يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة روبية، وينظر المعيار الشرعي رقم (15) بشأن الجعالة البند 2/3/8 الذي جاء في آخره: "شريطة عدم اتخاذ ذلك ذريعة لعمليات الإقراض بفائدة بالاشتراك أو العرف أو التواطؤ بين المؤسسات".

### 9. نفقات خدمات القرض

1/9 يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أحد زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محظمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تغول إلىفائدة. والأصل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعسر ذلك، كما في أوعية الإقراض المشتركة، فلا مانع من تحمل التكاليف الإجمالية المباشرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشرعية، بالتنسيق مع جهة الحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمل كل قرض ببنسبة، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة.

**2/9** لا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.

#### 10. أهم التطبيقات المعاصرة للفرض

من أهم التطبيقات المعاصرة للفرض ما يأتي:

##### 1/10 الحسابات الجارية

1/1/10 حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة ويشتت مثلها في ذمتها.

2/1/10 يجوز للمؤسسة أن تتقاضى أجراً على الخدمات التي تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية.

3/1/10 يجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستفادة لأصحاب الحسابات الجارية مقابل أو بدون مقابل، كدفاتر الشيكات وبطاقات الصرف الآلي ونحوها. ولا مانع من أن تميز المؤسسة بين أصحاب الحسابات الجارية فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات.

##### 2/10 جوانز الفرض

لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحلها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومنافع لا تتعلق بالإيداع والسحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضها، مثل الإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان وصناديق الأمانات ورسوم الحالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، وليس في حكمها الجوائز والمزایا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية.

##### 3/10 رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي

1/3/10 الرسم المأمور على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف الآلي أجراً عن الخدمة، وهي منفصلة عن الفرض.

2/3/10 يجب أن يكون الرسم المفروض على السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي مبلغاً مقطوعاً في حدود أجراً مثل عن الخدمة دون الاسترداد من القرض، ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة التحويل بوضع شرائح للسحب من أجل تكرار الأجرة. كما لا يجوز مراعاة زمن السداد للمبلغ المسحوب. وفي حال اختلاف العملة يشترط تطبيق سعر الصرف السائد. وينظر المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند 5/4.

#### 4/10 كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها

درءاً لدفع الفائدة بين المؤسسة ومراسليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسسة مع غيرها من البنوك المراسلة على تغطية ما انكشف من حسابات أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائد. ينظر المعيار الشرعي رقم (1) بشأن المتاجرة في العملات البند 4/2.

#### 11. تاريخ إصدار المعيار

صدر هذا المعيار بتاريخ 30 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 19 أيار (مايو) 2004 م.



هيئة المحاسبة والمراجعة  
للمؤسسات المالية الإسلامية

### اعتماد المعيار

اعتمد المجلس الشرعي للمعيار الشرعي للقرض في اجتماعه (12) المنعقد في المدينة المنورة في 26 - 30 ربيع الأول 1425 هـ الموافق 15 - 19 أيار (مايو) 2004 م.



### ملحق (أ)

#### نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (8) المنعقد في الفترة من 28 صفر - 3 ربيع الأول 1423 هـ = 11 – 16 أيار (مايو) 2002م في المدينة المنورة إصدار معيار شرعي للقرض.

وفي يوم 24 رجب 1423 هـ = 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2002م، قررت لجنة المعايير الشرعية تكليف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معيار القرض.

وفي الاجتماع رقم (7) للجنة المعايير الشرعية رقم (1) الذي عقد بتاريخ 16 حرم 1424 هـ = 19 آذار (مارس) 2003م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية، وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

وفي الاجتماع رقم (8) للجنة المعايير الشرعية رقم (1) الذي عقد بتاريخ 16 – 17 نيسان (أبريل) 2003م في مملكة البحرين ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار القرض وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 و 26 ربيع الآخر 1424 هـ = 25 و 26 حزيران (يونيو) 2003م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

ناقشت اللجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعها رقم (9) المنعقد في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 23، 24 جمادى الأولى 1424 هـ = 23، 24 تموز (يوليو) 2003م وأدخلت التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (11) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 8-2 رمضان 1424 هـ = 27 تشرين الأول (أكتوبر) – 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وأدخل تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 29 ذي القعدة 1424 هـ = 21 كانون الثاني (يناير) 2004م، وحضرها ما يزيد عن خمسة عشر مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء

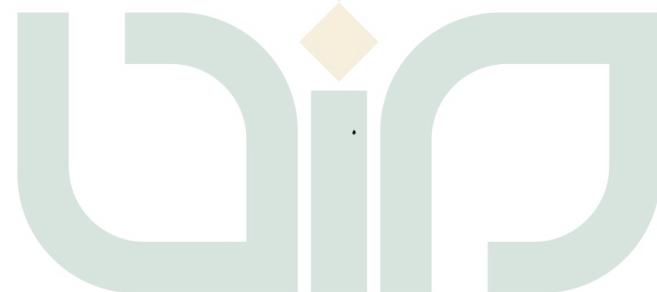
هيئة المعايير والمراجعة  
للمؤسسات المالية الإسلامية

منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أَم ما طرح خلالها، وقام أعضاء من لجنتي المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2)  
بإلاجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

ناقشت لجنتا المعايير الشرعية رقم (1) ورقم (2) في اجتماعهما المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 30 ذي القعدة  
1424 هـ = 22 كانون الثاني (يناير) 2004م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي  
أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأها مناسبة.

عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على لجنة الصياغة في الاجتماع المنعقد في مملكة البحرين بتاريخ 25 صفر  
1425 هـ = 15 نيسان (أبريل) 2004م.

ناقش المجلس الشعري في اجتماعه رقم (12) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 26 - 30 ربيع الأول 1425 هـ  
= 15 - 20 أيار (مايو) 2004م التعديلات التي افترحتها لجنة المعايير الشرعية ولجنة الصياغة، وأدخل  
التعديلات التي رأها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما  
هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.



**ملحق (ب)****مستند الأحكام الشرعية**

\* مستند اشتراط أن يكون المال المقرض معلوماً هو تكين المفترض من رد البدل المماثل للقرض.

\* مستند أن المفترض لا يملك المال المقرض إلا بالقبض أن القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التبرع، غير أن جانب التبرع فيه أرجح، فكان حكمه كالهبة تنتقل الملكية فيها بالقبض.

\* مستند اشتراط أن يكون محل القرض مثلياً لأنه هو الذي يمكن رد مثله، ولأن المثلثات تضمن في الغصب والإتلاف بمتلها.

\* مستند إلزام المفترض الوفاء في نفس المكان الذي وقع فيه القرض عند عدم اشتراط خلاف ذلك هو أن ذلك هو الأصل.

**اشتراط الزيادة في بدل القرض**

\* مستند تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمفترض: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الدالة على تحريم ربا القرض.

**اشتراط الوفاء في غير بلد القرض**

\* مستند جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، بحيث يكون على وجه الإرافق بالمحترض، سواء انتفع المفترض أو لا، هو ما يأتي:

1. أن الآثار المروية<sup>(2)</sup> عن الصحابة -رضي الله عنهم- تدل على جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض. وهو قول عند المالكية والحنابلة، واعتاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية.

2. أن في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمفترض والمفترض جمياً غالباً من غير ضرر بواحد منهما مع وجود الحاجة، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضر فيها، بل بمشروعيتها، وإنما ينهى عما يضرهم، وهذه المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة.

3. أن الأصل في المعاملات الإباحة، واحتراط الوفاء في غير بلد القرض ليس منصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص على تحريمه حتى يقاس عليه، فوجب إيقاؤه على الإباحة.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 279/6، والستن الكجرى للبيهقي 352/5.

### اشترط الأجل في القرض

\* مستند جواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل: الأدلة على مشروعية الأجل، ووجوب الوفاء بالشروط والعقود، لتحقيق المقصود من القرض، ولدفع الضرر.

### اشترط عقد البيع في القرض

\* مستند تحرير اشتراط عقد البيع في عقد القرض ما يأتي:

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.<sup>(3)</sup>

ووجه الاستدلال: أن السلف في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع"، يعني القرض، والحديث يدل على عدم جواز الجمع بين القرض والبيع في عقد واحد، وهو يشمل بعمومه عدم جواز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، وعدم جواز اشتراط عقد القرض في عقد البيع.

2. أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض لأن ربا يحيى في الثمن من أجل القرض فيكون القرض حاراً لمنفعة مشروطة فيكون ربا. وهذه من الذرائع المتفق على منعها وسدها.

3. أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو الإرافق، وذلك أن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والملائمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.

\* مستند تحرير اشتراط المقرض على المقترض هدية هو أن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة مشروطة للمقرض وهي الهدية فيكون ربا محظوظاً، وينجح العقد عن كونه عقد إرافق إلى عقد ربوى. وأن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام، ومنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض يتغنى بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياها.

(3) أخرجه أبو داود والنفط له عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- في باب في الرجل بيع ما ليس عنده، من كتاب البيوع، الحديث رقم (3504)، سنن أبي داود / 3، 283، والترمذني في باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك، من كتاب البيوع، الحديث رقم (1234)، سنن الترمذني / 3، 526-527، والنسائي في باب شرطان في بيع، من كتاب البيوع، الحديث رقم (4644)، سنن النسائي / 7، 340، وأحمد في مسنده المكتشين من الصحابة، الحديث رقم (6633)، مسنده / 2، 373، من طرق، كلهم عن أبيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو به. والحديث حسن، ويرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الصحيح لغيره.

### اشترط الجعل على الاقتراض بالجاه

\* مستند جواز اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه أنه مقابل عن خدمة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جوازأخذ الجعل على الشفاعة والجاه.

### نفقات الخدمات الفعلية

\* مستند جواز أن يأخذ المقرض ما يعادل التكلفة الفعلية فقط أنها ليست زيادة على القرض والمقرض محسن وما على الحسن من سبيل، ومستند تحرير أخذ زيادة عليها أنها تكون عوضاً عن القرض حينئذ. وقد صدر بشأن التكاليف الفعلية للقرض قرار بمجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 13 (3/1).

### لمنافع المادية غير المشروطة عند الوفاء

\* مستند جواز الزيادة عند الوفاء من غير شرط ولا عادة في القدر أو الصفة إذا كانت على سبيل البر والمعروف هو ما ورد عن أبي رافع -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضى الرجل بكراً، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أحد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إيه إن خيار الناس أحسنهم قضاء<sup>(4)</sup>. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إيه. فجاء الرجل يقتاضاه فأعطاه وسقاً، وقال نصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي<sup>(5)</sup>.

### المنافع المادية غير المشروطة قبل الوفاء

\* مستند المنع من المنافع غير المشروطة المقدمة قبل الوفاء إلا إذا كانت تلك المنافع ليست من أجل القرض ولا في مقابلها ما يأتي:

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المسافة. باب من استسلف شيئاً قضى خيراً منه.

(5) أخرجه البهقي في السنن الكبرى 351/5.

- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضاً فآهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.<sup>(6)</sup>

الآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم- الدالة على المنع من قبول هدية المقترض ونحوها من المنساقع، ما لم يدل دليل على أن المتفعة ليست من أجل القرض، إلا أن يكافئه عنها المقرض، أو يحسبيها من دينه.

الحسابات الجارية

\* مستند تكيف الحسابات الجارية بأنها قروض، ما يأْتِي:

- أن المصرف يمتلك المبالغ المودعة في الحسابات الجارية ويكون له الحق في التصرف فيها وله نماذج، ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معنى القرض الذي هو دفع مال من ينتفع به - أي يستخدمه ويستهلكه في أغراضه - ويرد بده، وهذا بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي التي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ، بحيث لا يستخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها.

أ. أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة الجارية، ويكون ضامناً لها إذا تلفت سواء فرط أم لم يفرط وهذا مقتضى عقد القرض، بخلاف الوديعة في الاصطلاح الفقهي حيث تكون الوديعة أمانة عند المودع، فإن تلفت يتبعه أثر قفريط ضمن، وإن تلفت من غير تعد منه أو قفريط فإنه لا يضمن. وقد صدر بشأن حقيقة الحسابات الجارية قرار مجلس الفقه الإسلامي الدولي رقم 86(9/3).

\* مستند جواز تقاضي المصرف أجرأً في الحساب الجاري- على الخدمات التي يقدمها؛ زيادة عن الإيفاء الواجب عليه هو أنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها وتقديمها للعميل.

\* مستند جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي والخدمات المميزة دون مقابل، ما يأتى:

- أن المنفعة الإضافية في هذه المسألة مشتركة للطرفين . المقرض والمقترض . فكلماها متتفق فتقابل المنفعتان، بل إن المنفعة التي تعود على العميل من جراء استخدام دفتر الشيكات وبطاقة الصراف الآلي منفعة تابعة وليست أساسية، حيث إن المصرف وضع هذا النظام لخدمة مصالحه وأغراضه المتعددة، فمتمنعة المصرف من هذا النظام منفعة أساسية، وأما تتحقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نتيجة من نتائج استخدام المصرف هذا النظام لتحقيق مصالحه وأغراضه.

(6) أخرجها ابن ماجه رقم 2457.

2. أن المنفعة التي يحصل عليها صاحب الحساب الجاري - المقرض - من هذا النظام دون مقابل ليست منفعة منفصلة عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي افترضها، حيث إنه مطالب بسداد القروض لكل مقرض متى طلب ذلك.

\* مستند تحريم الجوائز والهدايا إذا كان سببها هو القرض، بحيث إن من يقرض البنك يعطي من هذه الجوائز والهدايا هو أنها من قبل الهدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض<sup>(7)</sup>. وأما مستند جواز الجوائز والهدايا إذا كانت عامة فهو عدم ارتباطها بالقرض فلا شبهة فيها.

#### كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسيلها

\* مستند جواز كشف الحسابات بين المؤسسات ومراسيلها هو الحاجة العامة، وأن المنفعة الحاصلة من جراء ذلك لا تخص المقرض وحده، بل هي منفعة متماثلة، وأنها ليست من ذات القرض وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، فلا ترد مسألة (أسلفني وأسلفك).



(7) وقد صدر بشأن الجوائز والهدايا على القروض قرار الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية رقم (355).

هيئة الحاسبة والمراجعة  
للمؤسسات المالية الإسلامية  
**ملحق (ج)**

### التعريفات

#### **المتفعة في القرض**

هي الفائدة أو المصلحة التي يحصل عليها المقرض في عقد القرض بسبب هذا العقد.  
وقد تكون المتفعة في القرض مادية، أو عرضية، أو معنوية.

#### **الحسابات الجارية**

هي القروض التي تكون الحساب الجاري، بحيث يتملك المصرف هذه المبالغ ويضمنها، ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.

#### **المثليات**

هي النقود، والمكيلات والموازنات والمذروعات والمعدودات المتقاربة التي لا تفاوت آحادها تفاوتاً مختلفاً به قيمتها.

#### **القيمتيات**

هي الأموال التي تتفاوت آحادها تفاوتاً مختلفاً به قيمتها، كالحيوان.

#### **أهلية التبرع**

هي صلاحية المكلف لبذل مال أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباً.

#### **أهلية التصرف**

هي صلاحية الشخص لصدور الفعل عنه أو القول منه على وجه يعتد به شرعاً، ومناطها التمييز والعقل والبلوغ.

#### **أهلية الأداء الناقصة**

هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر بأن يتوقف نفاذها على رأي غيره.

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : M. Nurul Ahsan, Lc.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 01 Juli 1979  
 Alamat Asal/Tinggal : Jl. K.H. Zainal Abidin, RT. 10  
                           RW. 01, Talokwohmojo,  
                           Ngawen, Blora, Jawa Tengah,  
                           58254.  
 Email : asliahsan@gmail.com  
 No. HP : +62 8521 8949 0280



### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal:

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN I Talokwohmojo, Ngawen, Blora.	
SMP/MTs.	Mambaul Huda Talokwohmojo, Ngawen, Blora	2003
SMA/MA.	MA. Al-Anwar, Sarang, Rembang.	2005
S1	Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.	2015
S2	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2018

#### Pendidikan Non Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
Al-Qur`an	PPTQ Al-Muyassar, Lasem, Rembang.	
Penguasaan kitab	PP. Al-Anwar, Sarang, Rembang.	2005

### C. Pengalaman Organisasi

1. Tim Konseptor Simposium Internasional Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, 2016
2. Nara Sumber Dialog Ramadan di Radio PPI Dunia, 2016
3. Ketua Umum Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir, Periode 2014-2016
4. Koordinator Div. Website Lembaga Media dan Informasi (LMI) PCINU Mesir, 2010-2012
5. Direktur Eksekutif Research Center PCINU Mesir, 2012-2014
6. Lulusan Terbaik Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKEIS) ICMI Orsat Kairo, 2011-2013
7. Pembimbing Pusat Kajian Ekonomi Islam (PAKEIS) ICMI Orsat Kairo, 2013-2014
8. Pembimbing Sekolah Menulis (SMW) Kelompok Studi Walisongo (KSW) Mesir, 2013
9. Anggota Majelis Pertimbangan Anggota KSW Mesir, 2013-2014

10. Delegasi Pesantren Agrobisnis se-Jawa-Sumatera, Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) di Jakarta, 2004

D. Minat Keilmuan:

Fikih Progresif, *Uṣūl al-Fiqh, Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Tasawuf Falsafi, Teologi, Ekonomi Syariah, Politik dan Kenegaraan.

E. Karya-karya:

1. *An-Naḥw al-Muyassar* (Metode Cepat Baca Kitab)
2. *At-Takmilah: ‘alā Syarḥ al-Waraqāt li al-Imām Jalāl ad-Dīn al-Mahallī, ‘alā al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh li al-Imām al-Haramain* (Usul Fikih)
3. *Dalīl al-Maḥīd: fī Ma’rifah al-Haid, wa al-Nifās, wa al-Istihādah, wa Mā yata’allaqu bih min al-Aḥkām asy-Syar’iyyah* (Hukum siklus menstruasi)
4. Panduan Haid (terjemahan dari *Dalīl al-Maḥīd*).

